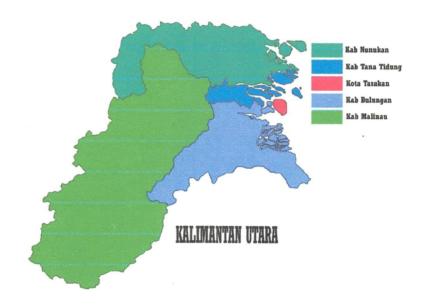


RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN (RENSTRA-P) TAHUN 2016 - 2021

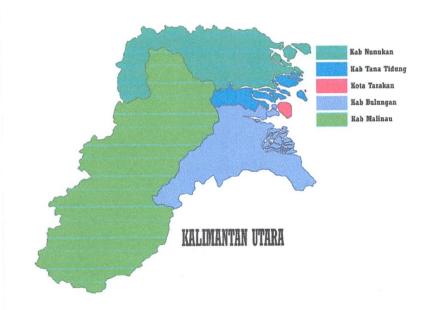


BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN 2018



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN (RENSTRA-P) TAHUN 2016 - 2021



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN 2018

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah salah satu instansi pemerintah yang bernaung di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sejak berdirinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dibidang idiologi kebangsaan, politik dalam negeri dan kewaspadaan nasional yang berada di wilayahnya.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SISPENAS) dan pasal 272 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 2016 ini adalah merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra tahun 2016-2021 pada era kepemimpinan Kepala Daerah yang baru di Kalimantan Utara, adapun Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA – PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara disusun mengacu pada Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, dan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Tahun 2005 – 2025.

anjung Selov 12 Maret 2018

Pembina Jiama Muda, IV/c NIP. 19691228 199101 1 001

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLI

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF..... DAFTAR ISI..... PENDAHULUAN1 BABI 1.1. Latar Belakang1 1.2. Landasan Hukum2 1.3. Maksud dan Tujuan.....4 1.4. Sistematika Penulisan4 GAWBARAN PELAYANAN7 BABII 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah19 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI......23 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi......23 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah23 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga......27 3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.......28 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategi......28 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN......29 4.2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah29 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF......34 BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD......35 BAB VII PENUTUP.......36

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA - PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan pasal 272 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA - PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara disusun mengacu pada Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang memuat program 5 (lima) tahunan kedepan.

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis perangkat daerah merupakan langkah awal untuk mengukur kinerja yang mengintegrasikan segenap keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara merancang rencana strategis perangkat daerah secara bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Perumusan rencana strategis perangkat daerah mengikuti tahapan mulai dari idealistik-kualitatif sampai teknis-kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA - PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan



Politik di Provinsi Kalimantan Utara secara bertahap yang dimulai dari tahun pertama 2017 sampai dengan 2021 seiring dengan masa jabatan Gubernur terpilih Kalimantan Utara.

Strategi, arah kebijakan, skenario dan tahapan pembangunan dilingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya dirumuskan secara konprehensif, efektif dan efisien guna menjamin kesinambungan dan keberlangsungan pembangunan jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (5 tahunan) dan jangka pendek (1 tahunan).

Dengan demikian, Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara ini sangat penting untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan khususnya dalam acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran kedepan.

1.2. Landasan Hukum

- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 171, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2787);
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 229, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5362);
- 4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);



- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Masyarakat (ILPPD) kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 42, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Ri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2);

14) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA - PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang pendanaannya melalui alokasi APBD Provinsi Kalimantan Utara, yang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA - PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

- 1. Sebagai pedoman penyusunan renja 5 (lima) tahun kedepan.
- 2. Menjamin konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah.
- Memberikan arahan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021.
- 4. Menjadi tolak ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara kepada Gubernur atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian rencana strategis perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 7 (tujuh) Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Bab ini berisi tentang uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara serta kinerja perangkat daerah, data dan informasi.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini berisi tentang uraian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telaahan visi dan misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra Kabupaten/Kota, dan isu strategis perangkat daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisikan tentang uraian tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisikan tentang uraian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokasi kegiatan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisikan tentang indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi tentang ringkasan rencana strategis perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dan Langkah-langkah yang akan dilaksanakan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara merupakan bagian Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 pasal 18, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pembinaan idiologi kebangsaan;
- d. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang politik dalam negeri;
- e. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang kewaspadaan nasional;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari pejabat struktural pada bagan struktur organisasi, antara lain:

1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a) Tugas Pokok

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan wewenang untuk memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.

b) Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- 1. Membantu Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.
- Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.
- 3. Mengadakan hubungan dengan instansi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2) Sekretaris

a) Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan dan pelaporan, urusan umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perlengkapan serta administrasi keuangan.

b) Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris berfungsi:

- Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan program dan pelaporan.
- 2. Melakukan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan.

- Melakukan penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan barang dan perlengkapan.
- 4. Melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan.
- 5. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3) Kepala Bidang Bina Idiologi Kebangsaan

a) Tugas Pokok

Memimpin, melaksanakan tugas Kepala Bidang Bina ideologi Kebangasaan sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga semua kegiatan yang menjadi tugas Bidang bisa berjalan sesuai dengan acuan yang telah ditentukan dan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.

b) Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Bina Idiologi Kebangsaan berfungsi :

- Melakukan pengarahan penyusunan rencana program Bidang Bina Idiologi Kebangsaan dengan mengarahkan dan memberikan petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
- Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Bina Idiologi Kebangsaan sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.
- Melakukan pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
- Melakukan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang Bina Idiologi Kebangsaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
- Melakukan pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Bina Idiologi Kebangsaan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.

- Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, pihak ketiga agar terjalin kerjasama yang baik untuk pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Idiologi Kebangsaan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang di hadapi serta upaya pemecahannya.
- 8. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
- Melakukan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

4) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

a) Tugas Pokok

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, penegakan Peraturan Perundang-Undangan, pemeriksaan dan penindakan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.

b) Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri berfungsi:

- Melakukan pengarahan penyusunan rencana program Bidang Politik Dalam Negeri dengan mengarahkan dan memberikan petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
- Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Politik Dalam Negeri sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.

- Melakukan pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan masing-masing.
- Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Melakukan pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
- Melakukan monitoring dan evaluasi, pemeriksaan, serta mengkaji hasilnya untuk mengetahui tingkat penyelesaian tugas, permasalahan dan upaya pemecahan permasalahannya.
- 7. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, pihak ketiga agar terjalin kerjasama yang baik untuk pelaksanaan kegiatan.
- 8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- 5) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
 - a) Tugas Pokok

Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian di bidang kewaspadaan.

b) Fungsi

 Melakukan penyiapan penyusunan rencana program Bidang Kewaspadaan Nasional berdasarkan peraturan yang berlaku.



- Melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
- Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional berdasarkan Peraturan untuk optimalisasi tugas.
- 4. Menyiapkan kerangka acuan pelaksanaan operasional berdasarkan standar operasional pelaksanaan pekerjaan.
- Melakukan pembinaan dan pengendalian, dan pengawasan keberadaan orang, tenaga dan lembaga asing bekerjasama dengan instansi terkait di Kalimantan Utara.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang di hadapi serta upaya pemecahannya.
- Melakukan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan dalam menentukan kebijakan.
- 8. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2.1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk memperkuat kelembagaan di Daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara telah di bentuk melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuang Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara tergambar Struktur Organisasi sebagai berikut:



- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - Kepala Sub Bagian Umum
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
- 3. Kepala Bidang Pembinaan Idiologi Kebangsaan
 - a. Sub. Bidang Ketahanan Idiologi Negara
 - b. Sub. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan
- 4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
 - a. Sub. Bidang Orpol, Ormas dan Kelembagaan
 - b. Sub. Bidang Lembaga perwakilan, Parpol dan Pemilu
- 5. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
 - a. Sub. Bidang Kewaspadaan Dini
 - b. Sub. Bidang Bina Masyarakat Perbatasan, Pengawasan
 Orang Asing dan Lembaga Asing

Tabel 2.1
Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Kalimantan Utara
(Pergub Nomor : 10 Tahun 2014)



2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara

Berbagai akses politik, ekonomi, sosial dan budaya serta ketertiban dan ketenteraman yang dibutuhkan masyarakat Kalimantan Utara kemungkinan tidak akan terwujud apabila perubahan mendasar di bidang pemerintahan sebagai wadah untuk mengekspresikan aspirasi politik tidak memenuhi harapan, disamping itu agenda reformasi yang telah didengungkan sejak 1998 yang lalu akan berjalan dengan menuai harapan dan hasil yang optimal apabila partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dapat terjamin aman/kondusif sehingga disintegrasi di Kalimantan Utara dapat terhindarkan.

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara menurut kualifikasi golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Kondisi Aparatur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kualifikasi Golongan
Per – Desember 2017

NO.	10.00 miles	KONDISI SEKARAN	G	KONDISI YANG DIHARAPKAN				
	GOL.	JENIS KEPEG.	KEPEG. JUMLAH		JENIS KEPEG.	JUMLAH		
1.		PNS	6	11	PNS	12		
2.	Ш	PNS	13	111	PNS	29		
3.	IV	PNS	5	IV	PNS	5		
JUMLAH			24	-	46			

Sumber: Badan Kesbangpol Lahun 201/

Berdasarkan tabel 2.2 di atas terlihat kondisi sekarang Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara menurut golongan masih belum memadai, untuk golongan II berjumlah 6 (enam) orang, golongan III berjumlah 13 (tiga belas) orang dan golongan IV berjumlah 5 (lima) orang, berdasarkan kondisi sumber daya manusia aparatur ini yang ada, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat kekurangan

sumber daya aparatur, dari total kekurangan tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara saat ini telah mengangkat tenaga operator komputer sebanyak 10 (sepuluh) orang dan cleaning service 1 (satu) orang dan penjaga malam/keamanan 2 (dua) orang, sedangkan perbandingan kondisi sumber daya manusia aparatur sekarang dan kondisi yang diharapkan menurut kualifikasi pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi

Kalimantan Utara Menurut Kualifikasi Pendidikan

Per – Desember 2017

	KOND	ISI SEKARANG		KONDISI YANG DIHARAPKAN				
NO	PENDIDIKAN	JENIS KEPEG.	JUMLAH	PENDIDIKAN	JENIS KEPEG.	JUMLAH		
1.	SLTA	PNS	6	SLTA	PNS	12		
2.	D III	PNS	2	D III	PNS	8		
3.	S1	PNS	14	S1	PNS	21		
4.	S2	PNS	2	S2	PNS	5		
JUMLAH			24	JUMLAF	JUMLAH			

Sumber: Badan Kesbangpol Tahun 2017

Tabel 2.3 di atas terlihat kondisi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara menurut kualifikasi pendidikan kondisi sekarang masih belum memadai, untuk kualifikasi SLTA sebanyak 6 (enam) orang, D.III sebanyak 2 (dua) orang S.1 berjumlah 14 (empat belas) orang serta S.2 berjumlah 2 (dua) orang, berdasarkan kondisi yang akan datang/yang diharapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara sangat memerlukan sumber daya aparatur mulai SLTA sebanyak 12 (dua belas) orang, D.III berbagai jurusan memerlukan sebanyak 8 (delapan) orang, S.1 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan S.2 diperlukan sebanyak 5 (lima) orang, kekurangan tenaga tersebut amat dibutuhkan segera untuk mengisi tenaga administratif pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dan



juga amat membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kualifikasi ahli di bidang manajerial, konsepsional yang memadai.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, sejak diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut dan merupakan tantangan kedepan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menyiapkan sarana dan prasarana terutama sarana dan prasaranan fisik gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara masih menyewa (kontrak) sehingga belum memenuhi syarat, sedangkan untuk sarana penunjang lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah cukup memadai, namun sampai saat ini kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi di Kalimantan Utara masih sangat kurang, untuk itu merupakan perhatian yang sangat serius bagi pemerintah daerah terhadap peningkatan kapasitas SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke depan yang disesuaikan dengan disiplin ilmu dan keahlian yang memang sangat dibutuhkan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, adapun data sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel 2.4

Daftar Sarana Dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Kalimantan Utara

Per – Desember 2017

NO	NAMA BARANG	SATUAN/ UNIT	PEROLEHAN/TAH	TAHUN			
1	2	3	4				
1.	Toyota Inova	1	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013			
2.	Toyota Hilux Type G	1	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013			
3.	Toyota Avanza Type G	1	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013			



4.	Honda Blade	3	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
5.	Komputer PC Acer	8	Pengadaan	2013
6.	Laptop Sony Vaio	6	Pengadaan	2013
7.	Komputer all in one	2	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
8.	Laptop HP	2	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
9.	Printer Canon MP 237	5	Pengadaan	2013
10.	Printer LQ 2190	1	Pengadaan	2013
11.	Meja pimpinan	1	Pengadaan	2013
12.	Kursi pimpinan	1	Pengadaan	2013
13.	Meja kerja	30	Pengadaan	2013
14.	Kursi kerja	30	Pengadaan	2013
15.	Sofa Tamu	1	Pengadaan	2013
16.	Meja sekuriti	2	Pengadaan	2013
17.	Lemari Arsip	5	Pengadaan	2013
18.	Toyota Hilux Type V	1	Pengadaan	2014
19.	Toyota Hilux Pick Up	3	Pengadaan	2014
-20.	Toyota Rush	4	Pengadaan	2014
21.	Honda Supra X	8	Pengadaan	2014
22.	Honda CBR	4	Pengadaan	2014
23.	Laptop HP	8	Pengadaan	2014
24.	Printer Epson LX 310	3	Pengadaan	2014
25.	Printer Epson L350	6	Pengadaan	2014
26.	Printer Canon LBP 6000	2	Pengadaan	2014
27.	Hardisk 1 TB	4	Pengadaan	2014
28.	Flask disk	7	Pengadaan	2014
29.	Kamera Canon EOS 600D	5	Pengadaan	2014
30.	Handycam Sony	3	Pengadaan	2014
31.	Infokus	5	Pengadaan	2014
32.	Handy Talki	32	Pengadaan	2014
33.	Brangkas	1	Pengadaan	2014
34.	Pemotong Kertas	1	Pengadaan	2014

35.	Felling kabinet	5	Pengadaan	2014
36.	Mesin ketik manual	1	Pengadaan	2014
37.	Laptop	5	Pengadaan	2015
38.	Printer	2	Pengadaan	2015
39.	Printer	10	Pengadaan	2015
40.	Kipas Angin	5	Pengadaan	2015
41.	Exster Hard Disk 2 TB	6	Pengadaan	2015
42.	Flasdis 32 GB Usb 3.0	10	Pengadaan	2015
43.	Mesin Jilid	1	Pengadaan	2015
44	Mesin Pres	1	Pengadaan	-2015
45.	Router	1	Pengadaan	2015
46.	Switch	1	Pengadaan	2015
47.	Kabel Jaringan	1	Pengadaan	2015
48.	Scaner Outomatik	3	Pengadaan	2015
49.	Sepeda Motor Vario	6	Pengadaan	2015
50.	Mobil Toyota Fortuner	1	Pengadaan	2015
51.	AC Mobil dan Tape	3	Pengadaan	2015
52.	Komputer PC	5	Pengadaan	2015
53.	Mesin Foto Copy	1	Pengadaan	2015
54.	Penghisap Debu	1	Pengadaan	2015
55.	Penghitung Uang	1	Pengadaan	2015
56.	Mesin Ginset	1	Pengadaan	2015
57.	Mesin Absensi	1	Pengadaan	2015
58.	Filling Kabinet	5	Pengadaan	2015
59.	UPS	4	Pengadaan	2015
60.	Komputer PC HP	2	Pengadaan	2016
61.	Kursi Hadap	4	Pengadaan	2016
62.	Kursi Tamu	2	Pengadaan	2016
63.	Meja Kerja Kayu/Esl IV	5	Pengadaan	2016
64.	Kursi Kerja Esl IV	7	Pengadaan	2016



65.	Amplifier	1	Pengadaan	2016
66.	Perlengkapan Mic	1	Pengadaan	2016
67.	Speaker	1	Pengadaan	2016
68.	Printer Portable	1	Pengadaan	2016
69.	Mesin Ketik Standar	2	Pengadaan	2016
70.	Lemari Arsip	2	Pengadaan	2016
71.	DVR	1 Unit	Pengadaan	2017
72.	Camera Indoor	10 Unit	Pengadaan	2017
73.	Camera Outdoor	6 Unit	Pengadaan	2017
74.	Cablel CCTV	1 Unit	Pengadaan	2017
75.	Jek BNC	32 Unit	Pengadaan	2017
76.	PSU	1 Unit	Pengadaan	2017
77.	Instalasi dan Asesoris	1 Unit	Pengadaan	2017
78.	Dak Kable 45x40	2 Unit	Pengadaan	2017
79.	TV 32 Inci	1 Unit	Pengadaan	2017

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu 4,5 (empat setengah) tahun semenjak berdirinya Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 22 April 2013 dan terbentuknya perangkat daerah sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 yang ditandai dengan pelantikan pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 10 Juli 2014 bahwa sampai tahun 2016, telah tercapai target kinerja pelayanan, sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 - 2016

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- (%)		Realisasi Capaian Tahun ke- (%)		Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
			2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	- 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Presentase administrasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan	60	55	60	90	55	60	90	100	100	100



2	Presentase tingkat pelanggaran yang terjadi	55	55	50	25	50	46	35	90	92	71,43
3	Indek kepuasan masyarakat terhadap situasi dan kondisi ketertiban, keamanan dan kenyamanan	65	55	60	95	50	55	90	91	92	94,74
4	Presentase kerjasama dengan aparat pencegah kejahatan	60	53	55	85	48	50	90	90	91	92,94
5	Presentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan dan kesadaran berpolitik	70	58	60	75	55	58	70	94	96	93,33

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- (%)	Realisasi Capaian Tahun ke- (%)	Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)	
North Con-			2017	2017	2017	
1	2	3	4	5	6	
1	Presentase unit kerja yang mendapat pelayanan administrasi perkantoran.	100	100	100	100	
2	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana.	80	80	80	100	
3	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.	60	60	57	95	
4	Presentase kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan.	syarakat dan tokoh syarakat yang berpartisipasi 85 85 85 am menciptakan keamanan		85	100	
5	Persentase masyarakat kaltara yang berwawasan kebangsaan.	75	75	75	100	

Presentase partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik.	10
---	----

Sedangkan dalam kurun waktu 4 (tahun) tahun terakhir sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 yang ditandai dengan pelantikan pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 10 Juli 2014 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara telah dialokasikan anggaran untuk menunjang pencapaian target kinerja pelayanan sebagai berikut:

Tabel 2.7

Data Alokasi Anggaran dan Realisasi
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2014 - 2016

NO	JENIS	2014 JENIS			2015			2016		
NO .	BELANIA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Sp)	TINGKAT CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALIEASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rb)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
l.	Belanja Tidak Langsung	4.351.287.500	1.591.803.830	36,58%	4.694.558.758	2.472.995.747	52,68%	5.233.341.522	2.986.952.262	57,08%
	Belanja Pegawai	4.351.287.500	1.591.803.830	36,58%	4.694.558.758	2.472.995.747	52,68%	5.233.341.522	2.986.952.262	57,08%
II.	Belanja Langsung	30.683.791.825	8.627.312.211	28,12%	23.515.904.050	10.035.722.158	42,68%	13.020.541.000	9.179.081.420	70,50%
	- Belanja Pegawai	6.730.700.000	1.290.775.000	19,18%	7.545.750.000	4.132.236.000	54,24%	4.250.480.000	3.495.580.000	82,24%
	- Belanja Barang dan Jasa	15.772.141.825	3.733.521.711	23,67%	14.266.554.050	4.946.597.658	34,67%	8.650.061.000	5.581.861.420	64,53%
	- Belanja Modal	8.180.950.000	3.603.015.500	44,04%	1.703.600.000	956.888.500	56,17%	120.000.000	101.640.000	84,70%
	Jumlah	35.035.079.325	10.219.116.041	29,17%	28.210.462.808	12.508.717.905	44,34%	18.253.882.522	12.166.033.682	66,65%

Tabel 2.8

Data Alokasi Anggaran dan Realisasi
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2017

NO	JENIS BELANJA	2017							
	3345 5254 157	ANGGARA (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)					
l.	Belanja Tidak Langsung	4.079.871.826	3.231.234.600	79,20%					
	Belanja Pegawai	4.079.871.826	3.231.234.600	79,20%					
11.	Belanja Langsung	7.524.692.000	6.795.403.150	90,31%					
	- Belanja Pegawai	1.987.400.000	1.929.200.000	97,07%					
	- Belanja Barang dan Jasa	5.497.292.000	4.828.220.150	87,83%					
	- Belanja Modal	40.000.000	37.963.000	94,96%					
	Jumlah	11.604.563.826	10.026.637.750	86,40%					

2.3.1. Tantangan dan Peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, sehingga menjadi tujuan migran dari luar pulau Kalimantan Utara diantaranya dari pulau Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Sumatera dan dari daerah sekitarnya disamping itu berbagai macam etnis, dari berbagai macam suku, ini apabila dianalisa maka bermacam-macam pula status sosial, budaya dan ekonomi yang melekat pada masing-masing suku tersebut sehingga berdampak pada permasalahan kependudukan yang sangat kompleks apabila sejak dini tidak dikelola dengan baik sehingga akan mengancam keamanan dan ketertiban umum dimasyarakat Kalimantan Utara, adapun peluang dan tantangan yang dihadapi oleh badan kesbangpol sebagai berikut:

a. Tantangan

- Disintegrasi bangsa dikarenakan sebagian besar wilayah Kalimantan Utara merupakan daerah pedalamam dan perbatasan.
- 2. Tuntutan kebutuhan dan harapan akan masyarakat Indonesia baru yang ditandai dengan iklim demokratis dan keterbukaan, belum dapat diikuti sama cepatnya dengan nilainilai dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.
- Adanya kecenderungan sikap tidak menghargai orang lain, menyampaikan keinginan dan harapan cenderung yang sebebas-bebasnya.
- 4. Adanya kecenderungan unjuk rasa yang disertai kekerasan, intimidasi, perebutan kekuasaan politik nasional dan daerah.
- Adanya kecenderungan pengambilan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang tidak responsif dan belum sepenuhnya transparan.

b. Peluang

- Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif dalam upaya ikut mewujudkan rasa ketenteraman dan kenyamanan di Kalimantan Utara.
- 2. Kemudahan memperoleh akses informasi secara dini.
- 3. Dukungan orpol, ormas dan kelembagaan lainya dalam menciptakan kondisi yang kondusif sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman di Kalimantan Utara.
- Dukungan dari pemerintah daerah atas perumusan, perencanaan, pembinaan serta kebijakan guna mendukung pengembangan kapasitas aparatur cukup memadai.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan yang saat ini berkembang sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah:

- 1. Menurunnya rasa nasionalisme dikalangan masyarakat.
- 2. Masih kurangnya wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat.
- 3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik.
- 4. Isu sara sering menjadi pemicu konflik sosial

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

Visi "Berpadu dalam kemajemukan untuk mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman dan Damai, dengan didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa".

Diformulasikan berdasarkan hasil analisis terhadap potensi daerah dan permasalahan mendasar serta isu strategis yang terjadi di Kalimantan Utara.

Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan terdepan merupakan upaya optimal yang dilakukan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk mewujudkan provinsi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat terbaik yang berada di wilayah perbatasan. Sebagai wilayah perbatasan terdepan Provinsi Kalimantan Utara merupakan pintu gerbang, penjaga keutuhan, kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melambangkan kemakmuran bangsa Indonesia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang ingin dicapai kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan dan pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, berdaulat, sejahtera dan berkelanjutan. Sebagai wilayah perbatasan terdepan melambangkan tingkat kemajuan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan



Utara, khususnya. Pendekatan keamanan, kesejahteraan dan lingkungan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan.

Sebagai wujud dari wilayah perbatasan terdepan ditandai dengan tingginya aksesibilitas wilayah yang mendukung konektivitas antar wilayah, khususnya dengan pusat pemerintahan, pusat pelayanan publik dan wilayah lain yang relatif lebih maju; serta terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana wilayah melalui pembangunan infrastruktur sebagai pendukung terciptanya keseimbangan dengan wilayah perbatasan negara tetangga. Pengembangan perbatasan yang maju akan mengurangi beban pemerintah pusat karena warga yang sejahtera di perbatasan akan membantu menjaga kehormatan NKRI, termasuk dalam penyelesaian kejelasan tapal batas dengan negara tetangga. Hal ini akan mendukung kehormatan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang menjaga wilayah perbatasan dengan menunjukkan kondisi yang melambangkan kondisi Indonesia seluruhnya yang baik dan sejahtera.

Dalam perencanaan pembangunan Kalimantan Utara realitasnya masih memiliki beberapa permasalahan-permasalahan mendasar yang harus segera diselesaikan. Permasalahan itu adalah kondisi georafi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing.

b. Misi

Pembangunan Kalimantan Utara 2016-2021 mengemban visi yang harus direalisasikan adalah "Berpadu dalam kemajemukan untuk mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman dan Damai, dengan didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa" yang diwujudkan melalui sinergi tiga pokok visi yaitu : (1) Visi Mandiri, (2) Visi Aman dan Damai, (3) Visi Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.

Sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bngsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, maka analiasis terhadap misi Kepala Daerah Terpilih diarahkan pada misi ke 2 (Dua): Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai dan misi ke 3 (Tiga): Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa, telaahan terhadap misi 2 dan 3 adalah sebagai berikut:



Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai Misi yang kedua, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai, secara umum mengandung arti terciptanya kondisi yang menenteramkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari tanpa terganggunya kondisi keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah provinsi.

Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait keamanan dan kedamaian wilayah yang selama lima tahun mendatang harus tercapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai antara lain: menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan penegakan hukum. Pertahanan dan keamanan memang merupakan tugas dari pemerintah pusat, namun tanpa mengesampingkan ketentuan formal yang ada keamanan wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan perlu diciptakan karena dampaknya yang langsung dirasakan msyarakat setempat. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mendukung penciptaan suasana aman dan damai ini sesuai dengan peran seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada.

Bagian dari misi untuk menjaga kedaulatan negara diarahkan untuk daerah perbatasan dan wilayah secara keseluruhan.

Di perbatasan diupayakan untuk mendukung kemudahan terjaganya keutuhan NKRI sedangkan di wilayah keseluruhan diarahkan untuk menjaga keamanan secara umum. Sedangkan bagian dari misi untuk membangun perbatasan yang aman diarahkan untuk mewujudkan daerah perbatasan yang tertib dan tenteram.

Bagian dari misi untuk mewujudkan penegakan hukum diarahkan pada upaya unutk mewujudkan penegakan hukum dengan cara menyiapkan berbagai ketentuan untuk menjadi dasar penegakan hukum dan melakukan berbagai implemenetasi ketentuan tersebut dikegiatan nyata di lapangan. Adapun faKtor pendorong dan penghambat yang dihadapi badan kesbangpol terkait dengan misi kedua adalah:



- a) Faktor pendorong adalah peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat, agama, adat dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif.
- b) Faktor penghambat:
 - Masih rendahnya pemahaman hukum dikalangan masyarakat.
 - 2. Masih rendahnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyaman.
- Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa

Misi yang ketiga yaitu mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa. secara umum mengandung mengupayakan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagai kondisi yang harus terwujud untuk landasan mewujudkan visi lima tahun ke depan. Secara khusus misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti bersih dan tahun mendatang berwibawa selama lima dalam mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa antara lain: mewujudkan pemerintahan yang bersih. transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel diarahkan pada upaya mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta mewujudkan pemerintahan akuntabel.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pelayanan publik yang prima diarahkan pada penguatan suasana pemerintahan yang abdi masyarakat dalam pelayanan publik. terwujudnya pelayanan perizinan yang selalu meningkatkan pelayanan kependudukan. Adapun faktor pendorong dan

penghambat yang dihadapi badan kesbangpol terkait dengan misi ketiga adalah:

- a) Faktor pendorong adanya kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas aparatur.
- Faktor penghambat adalah strategi, kebijakan dan peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan sehingga menjadi permalasahan dalam pelaksanaan dilapangan.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga Kementerian Dalam Negeri

Sejak reformasi tahun 1998 keberhasilan penyelesaian konflik dan kesepakatan damai atas konflik di tanah air, keberhasilan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, hanya saja potensi konflik karena berbagai sebab masih cukup besar ancamanya bagi persatuan Indonesia, oleh karena itu pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa menjadi suatu keniscayaan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas persatuan dan kesatuan nasional.

a. Permasalahan dan isu strategis

- Pembangunan birokrasi dan tata kelola yang baik.
- Penataan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berdaya saing.
- 3. Revitalisasi pendidikan wawasan kebangsaan dan karekter bangsa.
- 4. Pembenahan sistem hukum yang berkeadilan.
- 5. Pemantapan sistem keamanan dan ketertiban dalam negeri.
- 6. Pembenahan kehidupan berdemokrasi.
- Reaktualisasi nilai-nilai budaya nasional dan lokal yang menguatkan karakter bangsa.

Tabel 3.1
Telahaan Rencana strategi Kementerian Dalam Negeri RI

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra 2019		
1	2	3	4		
Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa	Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa	Persentase penurunan angka potensi kerawanan konflik sosial yang berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)	0 %		

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara diketahui bahwa tidak bersinggungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis maka tidak disertakan /disajikan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS).

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam menyusun Rencana Strategis untuk kurun 5 tahun mendatang telah ditetapkan 3 (Tiga) isu yang menjadi perhatian Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara, adalah sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya pemahaman terhadap rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan.
- 2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik.
- 3. Isu sara sering menjadi pemicu konflik sosial.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah meningkatkan wawasan kebangsaan dan karakter masyarakat dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta memberikan pendidikan politik yang sehat dan demokratis.

b. Sasaran

Sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah meningkatnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial serta pemahaman masyarakat dalam berbangsa dan bernegara melalui politik.

Tabel 4.1
Review Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Tahun 2012 - 2016

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa.	Meningkatnya rasa toleransi dimasyarakat dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.	Meningkatnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan.	Persentase penurunan angka potensi kerawanan konflik sosial yang berbau suku, agama, ras dan antar yolongan (SARA).	-	-25	22	-20	18
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik yang sehat dan demokratis.	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam partisipasi pembangunan dibidang politik.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan berrbangsa dan bernegara melaui politik.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada.	-	62	65	68	70

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tahun 2016 - 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa.	Meningkatnya rasa toleransi dimasyarakat dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.	Meningkatnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan.	Persentase penurunan angka potensi kerawanan konflik sosial yang berbau suku, agama, ras dan antar gotongan (SARA).	16	14	12	10	5	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik yang sehat dan demokratis.	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam partisipasi pembangunan dibidang politik.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan berrbangsa dan bernegara melaui politik.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada.	73	76	79	82	85	

4.2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

4.2.1. Analisa Lingkungan Internal

Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara di masa yang akan datang tidak dapat terelakan dari pengaruh faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan yang ada pada organisasi, oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperbesar peranan kekuatan dan memperkecil kelemahan mengingat begitu kompleksnya variabel yang berkaitan dengan faktor internal.

a. Kekuatan

- Perumusan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.
- Sarana dan parasana pendukung kinerja organisasi cukup memadai.
- Sumber daya aparatur memiliki kemauan untuk berkembang.

b. Kelemahan

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi berpolitik.
- 2. Isu SARA sering menjadi pemicu konflik sosial
- Kuantitas dan kualitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara yang belum memadai.
- Hubungan hirarki antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota yang kurang jelas.

4.2.2. Analisa Lingkungan Eksternal

Berbagai usaha untuk memanfaatkan faktor ekstemal berupa peluang yang muncul perlu dilakukan disamping memperkecil dampak yang ditimbulkan dari ancaman, atas dasar itu, maka dapat diidentifikasi peluang dan ancaman yang berdampak luas terhadap pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.

a. Peluang

- Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif dalam upaya ikut mewujudkan rasa ketenteraman dan kenyamanan di Kalimantan Utara.
- 2. Kemudahan memperoleh akses informasi secara dini.
- Dukungan orpol, ormas dan kelembagaan lainya dalam menciptakan kondisi yang kondusif sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman di Kalimantan Utara.
- Dukungan dari pemerintah daerah atas perumusan, perencanaan, pembinaan serta kebijakan guna mendukung pengembangan kapasitas aparatur cukup memadai.
- Melakukan sosialisasi tentang pendidikan politik yang sehat dan demokratis dikalangan masyarakat.

b. Tantangan

- Disintegrasi bangsa dikarenakan sebagian besar wilayah Kalimantan Utara merupakan daerah pedalamam dan perbatasan.
- Tuntutan kebutuhan dan harapan akan masyarakat Indonesia baru yang ditandai dengan iklim demokratis dan keterbukaan, belum dapat diikuti sama cepatnya dengan nilai-nilai dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.
- Adanya kecenderungan sikap tidak menghargai orang lain, menyampaikan keinginan dan harapan cenderung yang sebebas-bebasnya.
- 4. Adanya kecenderungan unjuk rasa yang disertai kekerasan, intimidasi, perebutan kekuasaan politik nasional dan daerah.
- Adanya kecenderungan pengambilan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang tidak responsif dan belum sepenuhnya transparan.
- 6. Kondisi geografi dan demografi yang luas dan penyebaran penduduk yang tidak merata.
- Kondisi akses jalan yang belum memadai dan biaya transportasi yang mahal.

Tabel 4.3
Analisis Strategik Dengan Faktor SWOT

	otratogni Dongan i antoi t	
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (ALI) ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (ALE)	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	 Perumusan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan RPJMD. Sarana dan sarana pendukung kinerja cukup memadai. Sumber daya aparatur memiliki kemauan untuk berkembang. 	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi berpolitik. Isu SARA sering menjadi pemicu konflik sosial Kuantitas dan kualitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara yang belum memadai. Hubungan hierarki antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota yang kurang jelas.
PELUANG (O)	S+0	0+W



- 1. Memberdayakan masyarakat menuju 1. partisipasi aktif dalam upaya ikut mewujudkan rasa ketenteraman dan kenyamanan di Kalimantan Utara.
- 2. Kemudahan memperoleh akses 2. informasi secara dini.
- Dukungan orpol, ormas dan kelembagaan lainya dalam 3. menciptakan kondisi yang kondusif, sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman di Kalimantan Utara.
- 4. Dukungan dari pemerintah daerah atas perumusan, perencanaan, pembinaan serta kebijakan guna mendukung pengembangan kapasitas aparatur cukup memadai. 5 Melakukan sosialisasi tentang pendidikan politik yang sehat dan demokratis dikalangan masyarakat.
- Melakukan optimalisasi dengan pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia dengan ilmu pengetahun yang ada.
- Memacu peluang kerja-sama dalam segala bidang dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas.
- Sosialisasi dan membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM).

ANCAMAN/HAMBATAN (T)

1. Ancaman disintegrasi bangsa karena sebagaian besar wilayah provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah

2. Tuntutan kebutuhan dan harapan akan masyarakat Indonesia baru yang ditandai dengan iklim demokratis dan keterbukaan belum dapat diikuti sama cepatnya dengan nilai-nilai dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.

pedalaman dan perbatasan.

- 3. Berkembangnya iklim tidak menghargai orang lain, menyampaikan keinginan dan harapan cenderung yang sebebasbebasnya.
- 4. Unjuk rasa yang disertai kekerasan, intimidasi, perebutan kekuasaan politik nasional dan daerah.
- 5. Pengambilan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang tidak responsif dan belum sepenuhnya transparan.
- 6. Kondisi geografi dan demografi yang luas dan penyebaran penduduk yang tidak merata.
- 7. Kondisi akses jalan yang belum memadai dan biaya transportasi yang

1. Peningkatkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial.

S+T

- Menyusun strategi kebijakan untuk memacu kegiatan dalam pelaksanaan tugas.
- Meningkatkan hubungan komunikasi yg efektif antara pemerintah dan masyarakat
- Meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
- Menciptakan pembangunan sumberdaya manusia berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur.
- Meningkatkan kerja sama dengan tokoh masyarakat, ormas, orpol dan kelembagaan lainya dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara melalui politik.

W+T

- 1. Terbentuknya keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan pembangunan.
- Meningkatkan kewaspadaan dimasyarakat terhadap ancaman baik dari dalam atau luar.
- Menegakkan kepastian hukum guna menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dilingkungan masyarakat.
- Terlaksananya penyelesaian masalah konflik secara arif & bijaksana dengan tetap memperhatikan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang ada.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik.

a. Strategi:

 Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, maka di tetapkan strategi yang akan dilakukan adalah peningkatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui politik yang sehat dan demokratis.

b. Kebijakan:

 Dalam upaya mendukung strategi tersebut, maka kebijakan yang ditempuh adalah mengadakan penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dan pentingnya partisipasi dalam kehidupan berpolitik serta membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam upaya mencapai tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai acuan untuk mendukung tugas dan fungsi dalam upaya mewujudkan keamanan, ketentraman serta kenyamanan dilingkungan masyarakat melalui peningkatan kerjasama dengan aparatur penegak hukum dan keamanan serta inteljen daerah dalam upaya pencegahan dini terjadinya konflik sosial, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara merumuskan jenis program dan kegiatan yang akan ditempuh adalah:

(Lihat lampiran : Tabel 5.1 dan 5.2)

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang, adapun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD 2016 – 2021

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal		Kondisi Kinerja pada Akhir				
		Periode	2017	2018	2019	2020	2021	Periode Renstra
1	Persentase angka potensi kerawanan konflik sosial yang berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).	18	16	44	42	10	-5	-5
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada.	70	73	76	79	82	85	85

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Program/Autcome SKPD Tahun 2016 - 2021

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM PADA TAHUN KE-											
	PROGRAM	INDINATOR PROGRAM	2017	2018	2019	2020	2021							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)							
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100							
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana apararur	80	85	90	95	100							
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60	70	80	90	100							
4	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan	85	88	91	94	97							
5	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat kaltara yang berwawasan kebangsaan	75	80	85	90	95							
6	Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik	73	76	79	82	85							

BAB VII PENUTUP

Dalam upaya mencapai keadaan/situasi dan kondisi masyarakat Kalimantan Utara yang aman, nyaman, tentram, tertib dan damai, maka itu bukan semata-mata tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, tetapi diharapkan peran serta seluruh organisasi baik pemerintah maupun swasta, elemen masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara serta menjaga ketenteraman dan ketertiban dan kenyamanan di daerah Kalimantan Utara.

Disamping melakukan cara/langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu kiranya diperhatikan faktor kunci keberhasilan yang antara tain:

- Adanya komitmen pemerintah dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan Renstra dengan sepenuh hati, daya, dan upaya yang maksimal dan konsisten.
- 2. Adanya dokumen yang merinci Renstra ini dalam program tahunan yang dijadikan acuan dalam penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Utara.
- 3. Adanya pembagian tugas yang jelas kepada aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- 4. Adanya sumber-sumber pembiayaan yang memadai.
- Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang, sektor, program dan kegiatan pembangunan yang ada, baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan elemen masyarakat lainnya.
- Adanya konsistensi antara Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara.

TIM PENYUSUN PERUBAHAN PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA - PD) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 – 2021

PENANGGUNG JAWAB

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

: Drs. BASIRAN

: TAPIP PURNOMO, SH

: KASIYONO

: 1. HENDRA SAPUTRA, SE

2. AYOP CAHYONO, SE

3. SADRIANSYAH, S.IP

4. JAMALUDDIN, SE, M.Pd

5. ZAINUDDIN D, S.Pd

6. ROHANI

SEKRETARIAT

: 1. EDWIN FITRIO, S. Kom

2. FAJAR, S. Sos

3. VICTOR SUCIPTO RB, A.Md

4. VIVIA NIRMALA CITTA

LAMPIRAN

- Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2017;
 - 5.2 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2018-2021;

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017

					BADAN KES	ATUAN BAI	NGSA DAN POLIT	IK PROVIN	SI KALIMANT	AN UTARA T	AHUN 2017						_		
TILIIIAN	TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KIMERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL					T.VRGET	EINERJA PROGRAM	dan kerangka P	ENDANAAN					UNIT KERJA SKPD		
	ununuu.	ENDOKATOR SASSERED	PACORORI DAN REGISTAN	(OUTPUT)	PERENCANAAN	T	Tehun 2017		Tulne: 2018		hun 2019	Tr.	hun 2020	Te	hun 2021	KOPOLNI KIPERJA PA	CA AKHI I PENIODE NEVETRA CEPP	PENANGGUNG JAWAB	LORAST
	ļ	ļ		+	 	Target 7	Rp	Target	Rp 10	Teren	Rp	Turget	Bp	Terget	Rp	Terget	Rp .		
Test dezmenya transparaon pela ranan publik dalam uma sa keratana basma dan	Terwujuknya transparansi pelayanan publik dalam urusya keraman bangsa dan politik	Adanya transparansi pelayanan publik dalam, unuan kesatuan banasa dan	Pelayeran adránici azi yerkenterun	Personiaes unit heefe ; any memperoleh pelapanan administrati perhantenan	7044	7544	2,267,997,000	<u>-</u>	10	 "	12	1 2	14	1 2	16	17	18	19	- 2:
pelit k	- '	polisk	Penyadaan jasa cont monart	Junish suret menyer at 71 tog dikerim	600 Sunst	600 Sure	7,000,000			ļ .								Sekreturas	1 1
			Penyediam jera komunika: "mmber daya ar dan latrik	Aurilei, beilen penye isano jera listric, etc.	12 Bulan	12 Bulan	37,680,000			1								Sekretarist	1 1
l			Propedium jusa administra i bewegen	konventrari dan imeres Jumish penyedaan jara -dumast asi perkasa-am	12 Bulan	12 Bulan	954,900,000						İ	İ	ł		1	Sekretarısı.	1 /
1			Propodison jara krive oker kentor	Intrich bulen prope tiens jere keberahen karter yang dipantikan	12 Bulan	12 Duizo	16,000,000		i					l				Sekretarist	1 1
	İ		Penyadaan jara perlekan persistan kerja	Jurist proless dan perengkapan yang	25 Unit	25 Unit	10,000,000		ļ.					l				Sekretarist	1 1
			Penyedian shi tiki kanje	diperbaki Auntah bahan penyasianan aka naka kausor	12 Bulan	12 Bulan	84,017,000		1						1	1		Sekretarist	1 1
			Penyadaan barang cetakan dan penggandaan	yang dibundkan Amiah bulan penya liana barang catakan dan	12 Bulan	12 Bulan	79,000,000							Ì				Sekretanat	1 1
			Penyeduan komponen mni dani kitrikipenamngan bangsuan	penggandam Jumish belan penge haun komponen,	12 Bulan	l Unis	10,000,000								ĺ			Sekretarist	
			kamer Penyadian peralitan dan pulmphapan kantor	alaticatasi kriirritea Jamish progedam peraktan dan	5 Unit	5 Unit	45,000,000											Sebretariat	
				perlengkapan karator	1				l										
			Penyedian bahan bahan dan peraturan perundang- undangan	Jamish proyediana vaku majabis, kuran	2160 Eksemplar	2160 Eksemplar	27,610,000						İ	İ				Schretarist	
			Penyedian maker/elisan Lener	Justish porti makanyinin, m	4000 Porsi	4.000 Porsi	91,500,000											Sekretariat	
			Rapat-rapat koordinari dan keerstaa keluur daarah	Jumish kost dinasi é se k-astátusi kukus daerah	60 Kalı	60 Kali	556,500,000							l				Sekretariat	1 1
			Rapat-rapat koordaari, jeur bensen, den yengamaten da dahan daesah	Jumbih reput reput k ser-kaan pembuaan dan pengawasan di dalam da sah	90 Kalı	90 Kali	350,000,000							-				Sekretariat	
			Peningkatan saran dan prasarana aparatar	Calapan unit herja yang mendapatkan lapanan serana dan prasarana aparatar	75%	80%	418,000,000									1			
			Pranteware temahigna englyadang dan parkitan kantor	hunty deputieren ind gener	1 Unit	1 Unit	120,960,600		ļ			1						Gebretorisa	1 !
			Penntharean ritinberrala cenderean dessroperational	Jumlah kendaraan caasi sperasional yang dipelihen dan densesi	33 Wnit	33 Unit	298,000,000							l				Sekretarial	
			Peninghaun disiplic aproxim	Persontene tingkes kapatukan aparatur		· ·	· .					 	·				-		
			Progadam paksim dras c m perlengkapunya	Arzish pakuan setagam apangan dan kalengkapacaya			.											Sekretarist	
			Pengadan pakaian Ri 1933 nan-han tenensi	Anniah pakasan kharou k ari-hari tertesau										ł			i i	Sekretarist	
Terr-ujodnya masyankat yang taat perstuma perundang-undangan	Memphanya basadaran terhadap katastan peraturan persodang-usdangan	Berkorenguya pelanggaran terhadap persturan perundang- undangan	Peninghatan kapasisar sember daya aporasur	Percentase sumber daya aparatur yang mendiliki kompensassi sasual bidangnya	75%	80%	392,020,000												
			Pendidikan pelanbarik-ma	Amin's sparate yang mongkuti pelmban/tanate/dikin	27 Orang	27 Orang	150,000,000					1						Sekretarist	1 1
			Socialisasi peranatan perundeng-terdangan	Junish perena sastaina: peranan penadang-sadangan	500 Oning	300 Orang	242,020,600											Sekretanzi	
Terr planya ketertaranan	Teronjodnya rasa tentram dan	Kondin msa tentram den	Peningkatan keumanan lan kenyamanan lingkungan	Personsam kelompah manyarukai dan	87%	9040	1,147,650,000					 	 	 	 	 	t		
dan detertiban danasyarakan	arnan serta nyaman dibigiyangan maryarakat	aroan sersa nyaman Jingkungan manyarakat		tokok masjaraka pang berpartisipasi dalam mencipsakan kumanan dan kenjamanan tingtsanyan															
			Prischen pengendelise, kesa sassa dan kenyamanan ingkangsa	Jumbah kepistan propada san dan pelathan pengar-lahan komunan ian kenyamanan	5 Keylatan	5 Kegratan	654,160,600					ĺ						Bid Warner	
			Progradakan kebustagua dan gangguan dan keciatan manyanakan	Jamish kegisten pengen labus kebirangan dan samenyan	3 Kegesten	3 Kegiatan	493,350,000											Bid Wasnas	1 1
			maryaran. Pengendakan kesesanan ingkangsa	Arcish Engisten pengendahan beamanan												1		Bid Warnis	1 1
			Montoring, evaluate des pe apores	ingkungen Auslich inporen site best pemasasum den pengawasan craug sing dan lembaga asing														Bid Wasnes	
Mee ngkamya kewaspadase	Teronguloja kewarpadasa dan	Terjahnya hubungan dan	Program pemelikancan kantrantikuan dan	Persentens terholog ii vich kriminal	35%	30%	424,375,000					 		 	ļ.———	 	 		├──┤
on anongmarke kelonga	hubungan yang beronerga satos lembaga	anergi antar lembaga	pencegakan tindak ketan nal Penatkatan kernasan, denan sosrat kesmunan dalam	den kefekatun Junish kegatan ker esar 12 dengan aparet	2 Kanistan	1 Vocantos	334,375,000									1		Pr.4 Warren	
			tekzas pezusgahan kejabasan	dalam pencegahas kajukatan	2 Kegiatan	2 Kegietan						1				1		Bid. Wainss	i
			Mentoring, erabasi den priaporan	Junish isporan atsu kegy san ekososkud	2 Laporan	2 Laporan	90,000,000			L		L					L	Bid Ideologi	1

sta rike, unst berasma.	Termijodnya rasa solaransi arga naku, umat beragama, ras dan golongan	Terhindanya kociik sezie ndru, umat beraguas, rar dan gulongan	Program pengembangan skeweran kebangsaan	Persenten magniraha: halura yang berwanasan habangsa in	704+	7514	678,250,000									Bid Ideologi	
			Praingkaten telerann (as k trakunan dalam kebebapan beragama	hanish reper pengrou d. n. anggota FRUB dengan tokoh agama dar manyarakar	1 Kegistan	1 Paket	353,100,000									Bid Ideologi	
			Penngkatan rara sviduri 25 dan duan sonal ditalangan masyarakai	Amish kegistan Phingk éen rara soldarkar dan katan sonial	3 Kegistan	3 Poket	325,150,000									Bid Ideologi	
		l	Promptatan kesadara, ma parakse akan mini saini kibur bodaya bangsa	Jumbah kegistan Pitungk san kesadaran manyerahat akan mba-si is kitar bodaya I-anera	•											Bid Ideologi	
ets tyreum di mesperatus als o mennyketkan	Tercepanya masyarakai yang berwawasa kabangsam deben upaya menngkaikan katahar an	dalam manyarakat yang	Program Kandirana Pan Jembangan Warazan Kabangsum	Personan herje uene dengen instansi sodali dalam menjegi athan resa kehangsaan dirminan has	70%	7546	523,400,000							•			
rte tean roud	lona)	Artehenen rosial	Fardian pencapaian halop h dan berbagai forum kongunnan kunya dalam c inya peningkatan wawasan kohungsan	Seriah reper tirema pen beuran kebengsaan (FPK)	1 K¢	1 KgA	295,900,600									Bid Ideologs	
		l	Semmar, tak thow, didnik benngkatan warrassa. kabangsaan	Jumbih stumer, telk do-s, datud Peningkatan warnesse k. Fangusan	2 Kd	2 Koli	227,500,000		İ		1					Bid Ideologi	
olit in distant parakan yang	demokratis di masyarakat	berpolitik yang sehat dan	Program Pendidikan Pajitik Magaraket	Perentan periliped mayeraksi dalam kehidupan berpolidik	7046	7344	1,673,000,000	***************************************				-					
		demokratia	Penyukihan kapada muapan den	Farith propiletes toxa: \$ parts politic	2 Kal	2 KeA	652,600,000									Bid Poldages	
-			Pantrasi prayeleraim pers futum partai poink	Jumish fashtasi persebut, an pama pelak	1 Keli	1 Kak	472,000,000			}	į.					Bid Poldagri	
			Koerdineri forum foti-n di flum politik	Jumish kourdnasi dalar Berun-forum dakusi politik	•											Bid Poldagri	
j			Proyustnan data base part, Spolitik, ormas, LSM dan lembaga adar	Aurikh isporan data bus-paspol ormas LSM dan irmbaga adat h.asya		•										Bid Poldagri	
			Mestrong erabati praposas	Jurdih liporan mer; teriz § dan evakası	1 Leponen	f Laporan	548,400,000									Bid Poldagri	
			Panitzai panyelenggaram p ombhin kepala daerah	Josekh fariktan penyeler, gjaraan pemilhan kepala dasrah		-										Pid Poldagra	
			HAMMA	*			7,524,692,000					·					_

Tabel 5.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERIA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 - 2021

	<u> </u>	<u> </u>		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CARANAN DADA				TARGET KI	NERJA PROGRAM	dan kerangka pend	ANAAN				UNIT KERJA	
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program dan kegiatan	(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN AWAL PERENCANAAN	т	alnun 2018	1	Tahun 2019	1	akun 2020	T	ahun 2021	KONDISI KINERJA PAI	da ander periodik renetra Siopo	SEPD PENANGGUNG JAWAB	LOKAM
	i			1	İ	Turget	E _p	Target	l'ap	Target	Rp	Target	Rp	Target	Вp		
1	2	3	4	3	6	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ter aksamarya transparansi peli yanan adm perkuntoran dalam lingkup badan	Termijudnya transparansi pelayaran adm perkanteran dalam lingkup tadan kesahan	Adanya transparansi pelayanan adm perkantoran dalam lingtup badan	Pelayunun sündustrasi perkantoran	Personiage smit herja yang memperakah pelajuman administrasi perhantaran	100 ⁰ 6	100%	2.914,890,624	190%	7,686,416,656	100%	2,763,141.472	100%	2, 80,816,431	106%	13,591.762,183		
ken tum bangsa dan politik		kesatuan bangsa dan politik	Penyediaan jara ta. tel monyurat	Jumisk outst manyurst yang dikirim	600 Stures	600 Burst	6,000,000	600 Suret	6,500,000	600 Suret	6,500,000	600 Sunst	8,500,000	3000 Sunst	34,500,000	Sekretarist	
	1		Penyediam jasake munikasi,nant-er daya air dan listrik	Armiah i nim penyadaan jara listrik, air, kemusukasi ian internet	12 Bulan	12 Bulan	78.700,600	12 Bulan	000,000,8÷	12 Buten	000,000,000	12 Bulan	\$6,6\$0,600	60 Bulen	294,080,000	Sekreterist	
		ĺ	Penyedram jasa uč ninistrasi kouangan	Darishiy eny edisan jasa administrası perkusarını	12 Bulan	12 Bulan	926 600,000	12 Bulan	973,000,000	12 Bulan	\$ 79,800,000	12 Bulan	1,065,000,000	60 Balan	4,901,300,000	Sekretarist	
			Penyeditan jasako-bersihan kantor	Amiak tulur penyediaan jasa ketersihan kantor yang : ibutukkan	12 Bulan	12 Bulan	\$4,200,000	12 Bulan	÷4,200,000 ·	12 Bulas	54,200,000	12 Bulan	12,000,000	60 Bulan	190,600,000	9 ekretarist	
			Penyadiaan jaca pertadan peralatan kerja	Amilahi era atan dan pertengkapan yang diperbaiki	25 Unit	25 Unit	12.000,000	25 Unit	:5,000,000	25 Unit	10,000,000	25 Unit	15,000,000	25 Unit	62,000,000	Sekretarial	
			Penyadisan alat bi: s karter	Armiabbular penyediaan aist tulis kantor yang dibubat can	12 Bulan	12 Bulan	89 270,624	12 Bulan	*5,000,000	12 Bulso	82,050,000	12 Bulan	83,050,050	60 Bulan	411,387,624	Sekretarist	
			Penyediam kerang celakan dan penggandaan	Amish bake penyedisan barang cetakan dan penggan aan	12 Bulan	1.2 Bulan	000,000.87	12 Bulan	62,000,000	1.2 Bulen	56,500,000	12 Bulan	36,500,000	60 Bulan	332,000,000	Sekretarist	
			Penyedisan ke-rpe-sen instalasi listrik/penerangan banguran kanlor	Jamish tuku penyedisan komponen, sist/infalsei "elistrikan	12 Bulan	12 Bulan	000,000.8	12 Balan	: 2,000,000	12 Bulan	6,000,000	12 Bolun	6,000,000	60 Bulan	40,000,000	Sckretarist	
			Penyedisan peralatan dan perlengkapan kasator	Armish pengulaan perelatan dan perlangkapan kartor	5 Unio	5 Unit	53 .500,000	5 Unit	÷3,500,000	5 Unit	35,000,000	5 Unit	45,000,000	25 Unit	232,000,000	Sekretariat	
	İ	l	Penyedisan peralasan nunah tangga kantor	Amizis era etan rumah tangga kantor yang dirediakan	•	2 Junis	3.120,000	2 Jenis	6,120,000	2 Jenis	5,000,000	2 Jenis	6,674,959	2 Junis	47,914,959	Sckretarist	1
		İ	Penyediaan kelura kacaan dan peraturan perundang- undengan	Jumbih y esy edinan buku, mejalah, korso	2160 Eksemp ar	2160 Eksemplar	16 800,000	2160 Eksemplar	35,800,000	2160 Eksemplar	35,050,000	2160 Eksemplar	33,050,000	10800 Eksempler	139,700,000	Sekretarist	
			Penyediaan rarkan-minum kuntor	Jamisk-porsi maksavlminam	4000 Pani	4.000 Pensi	85.200,000	4.000 Porsi	:7,200,000	4.250 Porsi	85,200,000	4,250 Parsi	85,200,000	20500 Persi	411,300,000	Sekretarist	
	ŀ		Rapat-rapat koordi sasi dan konsultasi keluar darrah	Jumlah kecer tinasi dan konsultasi keluar dasrah	60 Kali	60 Reli	700,000,000	60 Kali	£**5,000,000	60 Kali	(41,691,472	60 Kati	641,691,472	300 Kali	1,114,882,944	Sekretariat	
			Rapal-repat let ardi aasi,pembanaan, dan pengawasan di dalam doorah	Jamiak-rapsi rapat koordinasi pembinaan dan pengara-sa, di dalam daerah	90 K-6	140 Kali	805.500,000	140 Kali	684,090,636	140 KaE	e54,500,000	140 Kali	664,500,000	650 Kali	3,361,096,656	Sekretarizi	
Ten-edianya sarana dan pes-arana kaptor dalam mendahang tugas	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelakranaan tugas kedinatan	Pelayanan publik unusan herbanggol dapat dilaksanakan lebih optunal	Peningkalan rarana dan prasarana aparatur	Cakupan unli kerja yang mendapaikan layanan saruna dan prusurana aparatur	80%	85%	000,010,±13	90%	375,000,000	95%	.567,000,000	100%	470,000.000	100%	2,087,900,000	Sekretariat	
ford metan			Penyawaan rus selvigedung/gurlang dan perlaman kantor	Jumlah gasu ig/kantor yang disewa	1 Unit	1 Unit	100,000,000	1 Unit	150,000,000	1 Unit	225,000,000	1 Unit	225,000,000	1 Unit	830,000,000	Sekretoriat	İ
	•		Pemeliharam naiz berkala kendaram dinas operas onal	Amilablead stan dinas/operational yang dipelihat a dan dinamal	33 Uzás	33 unit	254,000,000	33 unit	195,000,000	33 uzit	245,000,000	33 uni±	245,000,000	33 unit	1,237,000,000	Sekretariat	
			Pengadaan pakuan dinas dan perlengkapunya	Jumlakiy akai an seragam lapangan dan kelangki pomya		40 Stel	31 .000,000	•	-	40 Stel	45,000,000		·	80 Stel	•	Sckretarist	
			Pengadaan pakaian khusus harr-hari tertentu	Jomlaky styl en khusus heri-hari tertentu	·	40 Stel	40.020,000	•		40 Stel	52,000,000			80 Stel	•	Sekretarist	
Ter-vujudnya sparatur yang tasi peraturan perundang- undangan	Meningkatnya kesadaran aparatur terhadap ketokan peraturan perundang-undang an	Berkuringnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-untangan	Peningkatan kepesitas sumber daya aparatur	Peresatuas rumber daya aparatur yang memiliki ko apantensi sesual bidangnya	60%	70%	646,637,500	80%	540,700,000	90%	157,773,156	100%	507,773,156	100%	2,544,903,812		
		l	Pendirakan petatih un formal	Aurolah spare zur yang mengakata pelakaharaharakah/daklas	27 Onung	27 Orang	281.437,500	35 Org	245,700,000	40 Org	185,000,000	50 Org	235,000,000	179 Ong	1,097,137,500	Sekretarist	1
			Socialisasi peretus un perundung-undungan	Jumilali socialisasi peraturan perundang- undangan uri san kebangpol, politik dan pemerunkakan umum	1 Keglutan	1 Kegistan	365 200,000	1 Kegistan	295,000,000	1 Kegistan	272,773,156	1 Kegistus	272,773.156	5 Kegistan	1,447,766,312	Sekretsriat	
Ten-iptanya ketentaraman dan keterlihan dan asyarakat	Terwijudnya raza tentrara di n aman serta nyaman dilinghangan masyarakal	Kondisi rasa lengram dan aman serta nyaman dilingkungan mesyarakat	Peningkolan kesayanan dan kenyamanan lingkungan	Personnas veicospok maryarakas dan tokok masyarakas yang berpartiripasi dalam wene ipiakan keamanan dan kemunanya Iluokuwan	35%	85%	1,18: ,531,250	91%	1,273,581,250	94%	392,531,250	97%	×64,531,250	97%	5,689,150,000		
			Penyaltihan pengerdakan kesmanan dan kenyamanan lingkangan	Jumlaky eny sluten tenteng kesmanan dan kenyarkanan dilingkungan masyarakat	5 Kegistan	2 Kegistan	175 600,000	2 Kegisten	376,100,000	2 Kegiman	218,000,000	2 Kegistan	220,000,000	17 Kegistan	1,741,800,000	Bid. Wasmas	
			Pengendalian kouf ik sorial dimenyarekat	Danish raps pengendalian perunganan kendlik 105111	3 Kegistan	3 Registan	223 100,000	3 Kegistan	2*5,100,000	3 Kegiatan	215,000,000	3 Kegistan	215,000,000	15 Kegistan	1,481,750,900	Bid. Wasnes	1
			Peningkatan kewapadaan dini pemerutah daerah dan masyarakat	Junish-kegralan detekn dini dan pencegatan ikis terhadap segala ancaman, tentangan, humbatan dan gangguan dilinghungan masyarakat		2 Keginten	310,800,000	2 Kegisten	354,300,600	2 Kegistan	225,000,000	2 Kegistan	205,000,000	8 Kegistan	1,691,100,000	Bid. Wasnas	
			Peningkatan Renjamana pengawasan orang asing dan Jerahaga asing	Amilahrepat dengan interni yang tertait dalam pengawasan orang asing dan tembaga asir s	2 Kegistan	3 Kegiatan	316,031,250	3 Kegistan	2/8,031,250	3 Registan	224,531,250	3 Kegistan	224,531,250	14 Kegiatan	1,367,500,000	Bid. Wasnas	

Peragai nanyan kegistan Peragai basahan beragai basahan beragai basahan beragai basahan beragai basahan beragai basahan beragai basahan beragai basahan beragai baranyan basahan beragai basahan beragai baranyan basahan beragai baranyan basahan beragai baranyan basahan beragai baranyan basahan beragai baranyan basahan beragai baranyan basahan beragai baranyan basahan beragai baranyan basahan beragai baranyan basahan beragai baranyan basahan beragai baranyan basahan baranyan basahan baranyan baranyan basahan baranyan baran	Peningdam Pojers pri dan kerukunan dalam kehukupan bernagama Penungdatan esas calidarilasi dan katan sorial dibalangan manyeraksi. Penungdatan bersah an manyerahai akan nilai-nalai haban badaya bengsa. Pencapatan bitupah dan berlagai forum kepalan Peningdatan pengan pengangan pengangan pengangan penaganan Semanyi Jalam paga peningdatan menaganahan Semanyi Jalam paga peningdatan penganahan penganahan Semanyi Jalam paga pengangan penganahan penganahan Semanyi Jalam paga penganahan penganahan penganahan penganahan penganahan Semanyi Jalam penganahan penganaha	solidantes den ikutan sosial	1 Kepetan 1 Repetan - 1 Kali	i Kegistan 1 Kegistan 1 Kegistan 1 Keli	212.500,000 224.335,000 235.125,000	1 Kegistan 1 Kegistan 1 Kegistan	2:0,084,000 2:8,385,000 2:2,535,000	l Kegistan 1 Kegistan	177,065,000 173,922,500	l Registen	176,065,000 163,922,500	5 Kegintan 5 Kegintan	1,19:1,614,000 1,093,705,000	Hid. Ideologi Bid. Ideologi	۱ _۱
Percept Section of the Administrative Control of th	masyandat Penndesan Resaderan masyandan akan nilai-tulai luhat bukuya bangsa Pennispilan hitiapoh dan berbagu forum kesagamaan Jaunya dalam ayaya penindatan mensan kebangsan Semaner, talk show, distosa Penindatan wawasan	solidant or den ikatan sosial Jamilah kegi, tan penangkatan kesadaran maryantak skan nilas-nilas huhar budaya bangsa Jamilah apat forum pembaunan kebangsian (FPK)		1 Kegisten		·		1 Kegiatan	173,922,500	1 Kegiatan	163,922,500	5 Kegintan	1,091,705,000	Bid. Ideologi	
The desaways begitten pan idden politic may printed dalam benyolicit men grates dalam the reduced from the r	bulaya bangsa Pencapaian hilaepih dan berbagas forum kengamaan Jauraya dalam upaya peningkatan menesan kebengsaan Semana, ialk shawa, distous Peningkatan mawaann	manyamini sion nilai-nilai luhar budaya bangsa Jamlahenpai forum pembauran kabangsaan (FPK)		,	235 125,000	1 Kegistan	200 424 400								
Tre: domanyn begittm yen lidden politic may yerlan dalam beyeitin yen lidden yelitir yen yelitir beyeitin yen yelitir beyeitin yen yelitir beyeitin yen yelitir beyeitin yen yelitir beyeitin yen yelitir beyeitin yen yelitir beyeitin yen yelitir beyeitin yen yelitir beyeitin yen yelitir beyeitin	Jainnya dalam upaya peningkatan wawasan kabangsasn Seminar, talk show, diskusi Peningkatan wawasan	kebangsma (FPK)	1 Kali	1 Kali			2/2,323,000	1 Kegistun	195,000,000	l Kegistan	195,000,000	4 Kegistan	82 °,650,000	Bid. Ideologi	
The delawarys begitten particles of the delay begitten particles of the delay profit particles dailed begitten profit particles dailed begitten profit particles dailed begitten profit particles dailed begitten profit dailed begitten profit dailed begitten profit dailed begitten dailed begitten profit dailed begitten	Seminar, talk show, disloss Peningkasan wawsam	Namelah anna kalbada an akabasa			232.700,000	1 Kali	201,980,000	1 Kab	185,285,000	l Rafi	185,285,000	5 Kali	1,101,150,000	Bid. Idrologi	'
yan ikidan pulitak manyariatat dalam berpoisto. Imparistat	ketvengrasan	Peninghatan warasan ketangrasan	2 Kan	2 Kaši	201 900,000	2 Kati	3/0,100,000	2 Kali	131,625,000	2 Kali	151,625,000	10 Kefi	1,492,750,000	Bid. Ideologi	
meningkalan partisipasi permenganan melalus Perpuk mengantah dalam Haraganan Perpuk Per angsa dan bernagana	Pendidikan priitix manyarakat	Personiase partisipasi manjarahat Balam kekit sepan Derpolitik	73%	76%	1,222,400,000	79%	1,273,560,000	52%	.000,000,185	83%	957,600,000	35%	6.512,160,009		
Penings	Penyukhan politir, kepada masyarakat	Amilak penyahahan tereang partas politik	2 Kegistan	7 Kegistan	1% 250,000	7 Kegistan	247,450,000	7 Kegistan	203,600,000	7 Kepistan	202,600,000	30 Kegistan	1,483,500,000	Bid.Poldagri	'
I I Devised	Peringkatan Repascas partai politik	Aumlah verif kası dun monitoring backum perpol	-	12 Kali	282.100,000	12 Kali	2;0,100,000	12 Kali	193,000,000	12 Kali	172,000,000	48 R#i	1,363,200,000	Bid. Poldagri	'
kelenk	Peningtatan Remataan pemerintah, orpol, ormas dan kelembagaan karya	Amilab; eks anm stas pengajuan SKT, Turda Leper ormas dan verifikasi bantuan hibah ormas		6 Kali	712 200,000	6 Kati	2:7,800,000	6 Kali	233,000,000	6 Rali	176,000,000	24 Keli	970,000,000	Bid.Poldagri	
	Sosialisası nilai ir deke demokrasi indonesia (IDI) dı kalimantan utare	Amlah sozis lisari tentang rulai indeks demokrasi is donasta (IDI)	•	1 Kegintan	176.750,000	1 Kegisten	2:4,750,000	1 Kegisten	253,000,000	1 Registan	247,000,000	4 Kegistan	96.,300,000	Bid. Poldagri	
Peningi pilkada	Peningkaten kuslitus penyelenggaraan penulu, palpres,	Parallet sees; lisses under granting permilities to turn		1 Kegistan	278.100,000	1 Kegistan	213,460,000	1 Kegistan		1 Kegistan	160,000,000	4 Kegintan	1,219,960,000	Bid Poldagri	
	pilkada				7,484.859,374		7,4:2,251.906		6,580,943,378		6,452,618,337		35,241,044,995		1